

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian terus di tuntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa untuk negara, mencukupi penyediaan pangan di indonesia, dan bahan baku industri, serta untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada kenyataannya sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain, sehingga sektor pertanian di indonesia berperan sebagai penyangga pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian membutuhkan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, yaitu pupuk. Pupuk merupakan meterial yang di tambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang di perlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian pemerintah memutuskan untuk membangun perusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Untuk membantu meningkatkan produktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat indonesia serta mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejah teraan petani, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri melalui Surat Keputusan Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 february 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersusidi untuk sektor pertanian. Dan Kemenrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2015 Tahun Anggaran 2016. dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Dalam setiap organisasi pemerlingahan, Penyaluran pupuk bersubsidi memegang peran yang penting, karena berhasil tindakanya pengelolaan organisasi secara baik serta tergantung juga dari seberapa baik kualitas penyaluran pupuk yang di subsidi oleh pemerintah. Demikian halnya pada tingkat kecamatan panti kabupaten jember, dimana kualitas penyaluran pupuk yang di subsidi pemerintah yang di berikan sangat tergantung dari peran distributor dan pengecer di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Menurut pemberitaan di media masa dan desas - desus yang ada di masyarakat, Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti dirasa belum mencapai tujuan utama dari apa yang di inginkan pemerintah, karena masih ada saja kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tidak wajar, dan penyalah guanaan pupuk bersubsidi untuk perusahaan suasta, serta penyelewengan pupuk atau pupuk bersubsidi di kirim ke wilayah lain. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana sistem Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Selain hal tersebut, hampir terjadi setiap tahun menjelang musim tanam para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk.

Halini terjadi karena pupuk yang biasanya tersedia di toko –toko pertanian seakan – akan menghilang dari peredaran, selanjutnya karena kebutuhan dari para petani banyak sedangkan ketersediaan pupuk berkurang bahkan bisa di katakan langka di pasaran maka hal ini menyebabkan melambungnya harga pupuk. Jika hal ini terjadi setiap tahun di awal musim tanam dan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam hal ini tidak segera turun tangan mengatasi maka para petani di indonesia tetap akan menjadi objek permainan dari oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seiring dengan program peningkatan pangan. Pemerintah melalui suasebada beras seperti yang pernah indonesia capai pada pemerintahan pada masa orde baru maka permasalahan langkanya pupuk – pupuk pertanian di awal-awal musim tanam akan menjadi batu sandungan untuk mendukung program pemerintah tersebut. Hal ini selayaknya menjadi perhatian pemerintah melalui kementerian yang bersangkutan agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kesalahan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme Penyaluran pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai, yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan permasalahan penghambat penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh strata I (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Study Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember.